



## PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KEBUMEN MELALUI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA

Widodo<sup>1</sup>, Nur Wening<sup>2</sup>

Universitas Teknologi (UTY) Yogyakarta<sup>12</sup>

e-mail: [wiwidputragk@gmail.com](mailto:wiwidputragk@gmail.com), [weninguty@gmail.com](mailto:weninguty@gmail.com)

Diterima: 14/04/2026; Direvisi: 25/04/2026; Diterbitkan: 28/04/2026

### ABSTRAK

Reforma agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah, tetapi juga pada penataan akses guna meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah (UKM). Penelitian ini bertujuan mengkaji peran penataan akses dalam mendorong produktivitas UKM melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Proses analisis mengikuti tahapan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), mulai dari identifikasi hingga inklusi studi. Penelusuran literatur pada Google Scholar, Scopus, dan SINTA periode 2019–2025 menghasilkan 54 artikel, yang kemudian diseleksi menjadi 25 artikel yang relevan dan memenuhi kriteria. Hasil sintesis menunjukkan bahwa penataan akses berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas UKM melalui akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, serta perluasan pasar. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh integrasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan kesesuaian dengan kondisi lokal. Hambatan utama meliputi lemahnya koordinasi, ketidaksinkronan regulasi, dan rendahnya pemanfaatan teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa penataan akses merupakan faktor kunci dalam keberhasilan reforma agraria berbasis ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan kontekstual untuk mendorong peningkatan produktivitas UKM secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** penataan akses, reforma agraria, produktivitas UKM, SLR, PRISMA

### ABSTRACT

Agrarian reform extends beyond land redistribution to include access reform aimed at enhancing the productivity of small and medium enterprises (SMEs). This study examines the role of access reform in improving SME productivity using a *Systematic Literature Review* (SLR) approach. The review follows the *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) framework, covering identification, screening, eligibility, and inclusion stages. A literature search across Google Scholar, Scopus, and SINTA databases for the 2019–2025 period initially identified 54 articles, of which 25 met the inclusion criteria and were analyzed. The synthesis reveals that access reform contributes to SME productivity through improved financing access, capacity building, and market expansion. However, its effectiveness depends on policy integration, institutional capacity, and alignment with local conditions. Key challenges include weak coordination, regulatory inconsistencies, and limited adoption of digital technologies. These findings indicate that access reform is a central determinant of agrarian reform outcomes in economic terms. Therefore, integrated and context-sensitive policies are required to support sustainable SME productivity growth.

**Keywords:** access reform, agrarian reform, SME productivity, SLR, PRISMA



## PENDAHULUAN

Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran strategis dalam menopang struktur ekonomi nasional maupun daerah. Pada konteks wilayah seperti Kabupaten Kebumen, dominasi sektor informal menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam penyerapan tenaga kerja, penggerak aktivitas ekonomi berbasis masyarakat, serta instrumen pemerataan pendapatan. Meskipun demikian, kontribusi signifikan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas yang optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi kendala struktural yang kompleks, meliputi keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi produksi, lemahnya kapasitas manajerial, serta terbatasnya akses pasar yang lebih luas (Mikoa et al., 2022; Naufal et al., 2024; Mutiara & Safitri, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan yang dihadapi UMKM tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan desain kebijakan yang belum terintegrasi secara efektif dalam mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, reforma agraria hadir sebagai salah satu kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada redistribusi aset tanah, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pendekatan penataan akses (*access reform*). Secara konseptual, penataan akses menempatkan tanah sebagai aset produktif yang harus diikuti dengan intervensi kebijakan pendukung, seperti penyediaan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penguatan kapasitas manajerial, serta perluasan jaringan pemasaran (Fajar et al., 2022; Afif & Warman, 2025; Nadila et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari distribusi kepemilikan lahan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong transformasi ekonomi masyarakat penerima manfaat menuju peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Perspektif ini menegaskan bahwa penataan akses merupakan komponen kunci yang menentukan efektivitas reforma agraria dalam konteks pembangunan ekonomi lokal.

Namun demikian, implementasi kebijakan penataan akses di tingkat daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan. Kompleksitas aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, instansi pertanahan, lembaga keuangan, hingga kelompok masyarakat, sering kali tidak diimbangi dengan koordinasi yang efektif dan integrasi program yang memadai. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat parsial dan belum mampu menghasilkan dampak ekonomi yang optimal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa lemahnya integrasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah, serta minimnya dukungan infrastruktur menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi penataan akses (Dempo et al., 2021; Saheriyanto & Suhaimi, 2021; Saragih et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keberadaan program, melainkan pada kualitas tata kelola kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal.

Lebih lanjut, hubungan antara kebijakan penataan akses reforma agraria dengan peningkatan produktivitas UMKM masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Di satu sisi, beberapa program pemberdayaan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi usaha pada kelompok tertentu, namun di sisi lain dampaknya belum merata secara struktural. Ketidakkonsistenan ini semakin diperkuat oleh rendahnya tingkat adopsi teknologi digital di kalangan pelaku UMKM, padahal digitalisasi memiliki potensi besar dalam memperluas akses



pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing produk (Putri & Amrullah, 2024; Lubis et al., 2024; Rahmadani & Saraan, 2022). Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa efektivitas penataan akses belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan transformasi ekonomi berbasis teknologi yang semakin berkembang.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa sebagian besar studi masih menitikberatkan pada aspek redistribusi tanah (*asset reform*) atau evaluasi kebijakan secara umum tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan peningkatan produktivitas UMKM, khususnya pada konteks daerah. Selain itu, pendekatan metodologis yang digunakan masih didominasi oleh studi deskriptif dan studi kasus, sehingga belum mampu menghasilkan sintesis komprehensif yang mengintegrasikan berbagai temuan empiris secara sistematis. Penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) dalam kajian reforma agraria masih relatif terbatas, padahal pendekatan ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan transparansi, validitas, serta kekuatan evidensi dalam analisis kebijakan (Amrullah & Wening, 2026; Sopyan & Sidipurwenty, 2024; Sopyan et al., 2024; Page et al., 2022; Snyder, 2019). Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian yang mampu mengintegrasikan berbagai temuan ilmiah secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara penataan akses reforma agraria dan produktivitas UMKM.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penataan akses reforma agraria dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis PRISMA. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi pola kebijakan, mekanisme implementasi di tingkat daerah, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan, serta dampaknya terhadap penguatan ekonomi lokal. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan literatur reforma agraria, tetapi juga menghasilkan sintesis berbasis evidensi yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih kontekstual, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produktivitas UMKM di Kabupaten Kebumen.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis kebijakan penataan akses reforma agraria dan implikasinya terhadap produktivitas UMKM. Proses penelitian mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk menjamin transparansi dan konsistensi (Page et al., 2022; Snyder, 2019). Penelusuran literatur dilakukan pada database Google Scholar, Scopus, dan SINTA dengan rentang tahun 2019–2025 menggunakan kata kunci berbasis *Boolean operator*, yaitu “agrarian reform” OR “reforma agraria” AND “access reform” OR “penataan akses” AND “SME productivity” OR “produktivitas UMKM”. Hasil identifikasi awal memperoleh 54 artikel, kemudian setelah penghapusan duplikasi menjadi 45 artikel. Seleksi berdasarkan judul dan abstrak menghasilkan 34 artikel, dan setelah proses *full-text review* diperoleh 25 artikel yang memenuhi kriteria sebagai sampel akhir (*final inclusion*).

Kriteria inklusi meliputi artikel yang relevan dengan reforma agraria, penataan akses, dan produktivitas UMKM, serta memiliki metodologi yang jelas. Sebaliknya, artikel yang tidak relevan, tidak tersedia secara lengkap, atau memiliki kelemahan metodologis dikeluarkan dari analisis. Seluruh artikel yang terpilih kemudian dievaluasi melalui *quality*



assessment berdasarkan kejelasan tujuan, kesesuaian metode, dan validitas temuan. Data diekstraksi dan dianalisis menggunakan teknik *thematic synthesis* untuk mengidentifikasi pola, hubungan antar variabel, serta faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Seluruh tahapan penelitian divisualisasikan dalam diagram PRISMA guna memperkuat transparansi proses kajian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Hasil Sintesis Literatur (SLR)**

Penelitian ini menghasilkan temuan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengkaji artikel ilmiah yang relevan terkait kebijakan penataan akses reforma agraria dan implikasinya terhadap produktivitas usaha kecil dan menengah (UKM). Proses identifikasi dan seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), sehingga diperoleh artikel yang memenuhi kriteria inklusi berdasarkan relevansi topik, tahun publikasi, serta kualitas metodologi penelitian (Page et al., 2022; Snyder, 2019).

Hasil sintesis menunjukkan bahwa temuan penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama, yaitu: (1) bentuk kebijakan penataan akses reforma agraria, (2) mekanisme implementasi di tingkat pusat dan daerah, (3) faktor pendukung dan penghambat, serta (4) dampak terhadap produktivitas UKM. Ringkasan hasil sintesis literatur disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Sintesis Komprehensif Penelitian**

No Peneliti	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Implikasi
1 Afif & Warman (2025)	Aset & akses	Kualitatif	Sinergi aset dan akses meningkatkan kesejahteraan	Integrasi kebijakan penting
2 Amrullah & Wening (2026)	SLR agraria	SLR	Tata kelola agraria masih lemah	Perlu penguatan governance
3 Amrullah et al. (2025)	UMKM lokal	Studi kasus	Akses reform meningkatkan produktivitas usaha	Pendampingan krusial
4 Dempo et al. (2021)	Redistribusi tanah	Evaluatif	Distribusi belum efektif tanpa akses	Perlu pendekatan terpadu
5 Fajar et al. (2022)	Kebijakan agraria	Normatif	Reforma agraria berbasis keadilan sosial	Perlu landasan hukum kuat
6 Junarto (2022)	GTRA	Evaluasi	Koordinasi menentukan keberhasilan	GTRA Sinergi kelembagaan penting
7 Kementerian ATR/BPN (2023)	Implementasi	Kebijakan	Penataan akses berbasis pemberdayaan	Pendekatan partisipatif
8 Lubis et al. (2024)	Dampak ekonomi	Historis	Reforma agraria berdampak ekonomi	Berbasis distribusi adil



No	Peneliti	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Implikasi
9	Mikoa et al. (2022)	UMKM desa	Kuantitatif	Pemberdayaan meningkatkan ekonomi lokal	Pelatihan dibutuhkan
10	Mutiara & Safitri (2025)	Strategi UKM	Deskriptif	Akses pasar meningkatkan produktivitas	Perlu jejaring pasar
11	Nadila et al. (2025)	Ekonomi Islam	Konseptual	Reforma agraria mendukung keberlanjutan	Berbasis keadilan ekonomi
12	Naufal et al. (2024)	Ekonomi lokal	Empiris	Dampak positif terhadap pembangunan	Efek multiplier
13	Nento & Shamin (2025)	Pemberdayaan desa	Model	Pendampingan meningkatkan usaha	Model berbasis komunitas
14	Putra et al. (2025)	Regulasi	Analisis hukum	Disharmonisasi regulasi menghambat	Perlu harmonisasi
15	Putri & Amrullah (2024)	Teknologi lahan	SIG	Teknologi meningkatkan efisiensi	Digitalisasi penting
16	Rahmadani & Saraan (2022)	Dinamika agraria	Deskriptif	Reforma agraria berkembang dinamis	Adaptasi kebijakan
17	Rohman & Astuti (2019)	Access reform	Studi kasus	Akses reform belum optimal	Perlu integrasi
18	Saheriyanto & Suhaimi (2021)	Modal usaha	Kualitatif	Akses modal kunci produktivitas	Dukungan keuangan penting
19	Salfutra et al. (2025)	Problematika	Analisis	Banyak kendala struktural	Reformasi kebijakan
20	Saragih et al. (2024)	Implementasi lokal	Studi kasus	Implementasi kontekstual diperlukan	Pendekatan lokal
21	Sari & Suhadi (2024)	Regulasi tanah	Hukum	Reformasi regulasi diperlukan	Sinkronisasi kebijakan
22	Simamora (2025)	Konflik agraria	Analisis	Reforma agraria menekan konflik	Dampak sosial
23	Sopyan & Sidipurwenty (2024)	GTRA	Evaluatif	Kompleksitas pemberdayaan tinggi	Koordinasi penting
24	Sopyan et al. (2024)	Kebijakan Kebumen	Studi kebijakan	Akses reform berpengaruh pada UKM	Perlu penguatan lokal
25	Sopyan et al. (2024b)	SDGs	Analisis	Reforma agraria mendukung SDGs	Berbasis keberlanjutan



Hasil analisis pada aspek kebijakan menunjukkan bahwa penataan akses reforma agraria tidak dapat dipisahkan dari kebijakan redistribusi aset. Sinergi antara *asset reform* dan *access reform* menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas usaha. Kebijakan yang hanya berfokus pada redistribusi tanah tanpa dukungan akses ekonomi cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha. Pada aspek implementasi, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi kelembagaan, khususnya melalui peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Keterlibatan multi-aktor memerlukan sinergi yang kuat, sementara lemahnya koordinasi dan keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi hambatan utama.

Selanjutnya, faktor pendukung utama meliputi akses permodalan, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur ekonomi. Adapun faktor penghambat meliputi disharmonisasi regulasi, rendahnya literasi usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Dari sisi dampak, penataan akses reforma agraria terbukti berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas UKM melalui peningkatan kapasitas produksi, akses pasar, dan pendapatan masyarakat, serta menciptakan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

### Hasil Analisis Kontekstual Kabupaten Kebumen

Untuk memperkuat hasil sintesis literatur, penelitian ini juga mengkaji kondisi empiris Kabupaten Kebumen sebagai lokus kebijakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk sebesar 1.414.750 jiwa dengan angkatan kerja mencapai 855.785 orang. Kondisi ini menunjukkan potensi sumber daya manusia yang besar dalam pengembangan UKM berbasis reforma agraria.

#### Analisis SWOT

Hasil analisis SWOT disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Analisis SWOT Pengembangan UKM Berbasis Reforma Agraria di Kabupaten Kebumen**

Aspek	Uraian
<b>Strengths (Kekuatan)</b>	Jumlah UKM besar (56.466 unit); tenaga kerja tinggi; potensi SDM untuk pengembangan kompetensi
<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>	Tingkat kemiskinan masih tinggi (15,71%); keterbatasan modal; rendahnya kapasitas manajerial dan pemasaran
<b>Opportunities (Peluang)</b>	Potensi SDA (pertanian, pariwisata); destinasi wisata; dukungan pemerintah; bonus demografi
<b>Threats (Ancaman)</b>	Akses permodalan terbatas; persaingan pasar tinggi; kenaikan biaya produksi; rendahnya akses pasar

Sumber: Pengolahan data, 2025

### Struktur Industri UKM

Distribusi sektor industri di Kabupaten Kebumen ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Klasifikasi dan kelompok industri Kabupaten Kebumen**

No.	Klasifikasi Industri	Besar	Menengah	Kecil
1.	Industri makanan dan minuman	-	9	35.779
2.	Pengolahan tembakau	2	2	56



3.	Industri tekstil dan pakaian jadi	-	2	745
4.	Industri barang anyaman	1	5	8.858
5.	Industri kertas dan percetakan, rekaman	-	3	82
6.	Industr kimia, farmasi dan obat tradisional	-	9	455
6.	Industri furniture	-	-	28
7.	Jasa reparasi, pemasangan mesin & peralatan	-	6	7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 3, sektor industri makanan dan minuman mendominasi struktur UKM di Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan penataan akses perlu difokuskan pada sektor berbasis sumber daya lokal dan industri rumah tangga.

### Akses Permodalan

Data akses permodalan disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Akses permodalan pelaku UMKM dan Non UMKM di Kabupaten Kebumen**

No.	3 bulan terakhir (tahun 2024)	UMKM (Rp)	Non UMKM (Rp)
1.	September 2024	4.244.475.416.312	1.633.799.478.011
2.	Oktober 2024	4.241.476.605.468	1.641.647.064.754
3.	Nopember 2024	4.222.158.775.262	1.670.165.832.222

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 4, nilai akses permodalan UMKM menunjukkan tren relatif stabil pada kisaran Rp4,2 triliun selama periode September–November 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pembiayaan telah tersedia, namun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas usaha secara optimal.

### Pembahasan

#### Integrasi *Asset Reform* dan *Access Reform* dalam Transformasi Ekonomi Berbasis Agraria

Hasil penelitian pada bagian sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan penataan akses reforma agraria tidak dapat dipisahkan dari kebijakan redistribusi aset sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi berbasis agraria. Dalam perspektif *asset-based development*, kepemilikan aset produktif seperti tanah bukan sekadar simbol legalitas, melainkan merupakan modal ekonomi yang harus dioptimalkan melalui akses terhadap berbagai sumber daya pendukung. Tanah sebagai aset produksi akan memiliki nilai ekonomi yang signifikan apabila diiringi dengan akses terhadap modal, teknologi, informasi, serta jaringan pasar yang memadai.

Lebih jauh, hasil sintesis literatur pada Tabel 1 menunjukkan bahwa integrasi antara *asset reform* dan *access reform* merupakan determinan utama dalam meningkatkan produktivitas UKM. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kebijakan redistribusi lahan, tetapi harus dilihat sebagai proses transformasi struktural yang menghubungkan kepemilikan aset dengan aktivitas ekonomi produktif. Tanpa



adanya penataan akses, redistribusi tanah berpotensi menghasilkan *underutilized assets*, di mana lahan yang dimiliki tidak mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, penataan akses berfungsi sebagai mekanisme intervensi kebijakan yang menjembatani kesenjangan antara kepemilikan aset dan kemampuan pemanfaatannya. Akses terhadap pembiayaan, pelatihan, teknologi, serta pasar menjadi faktor yang menentukan apakah aset yang dimiliki dapat dikonversi menjadi output ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada kemampuan kebijakan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pemanfaatan aset secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Afif dan Warman (2025) serta Dempo et al. (2021) yang menegaskan bahwa integrasi kebijakan menjadi kunci dalam menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penataan akses tidak dapat diposisikan sebagai kebijakan tambahan, melainkan sebagai komponen inti dalam strategi pembangunan ekonomi berbasis agraria yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

### **Dinamika Kelembagaan dan Kompleksitas Tata Kelola dalam Implementasi Kebijakan**

Dalam perspektif *institutional theory*, efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola interaksi antar aktor, sumber daya, serta regulasi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan akses, khususnya dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Namun demikian, hasil sintesis pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan sistemik. Lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, serta fragmentasi kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan dalam tata kelola (*governance*) yang belum mampu mengintegrasikan berbagai komponen kebijakan secara sinergis.

Lebih lanjut, kompleksitas kelembagaan juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antar aktor serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola program. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan sering kali tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kabupaten Kebumen, potensi ekonomi yang besar sebagaimana ditunjukkan pada bagian hasil belum sepenuhnya dioptimalkan karena belum adanya integrasi kebijakan yang kuat di tingkat lokal.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas organisasi, tetapi juga mencakup perbaikan sistem koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar aktor. Penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Junarto (2022), Sopyan & Sidipurwanti (2024), serta Amrullah & Wening (2026) yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola dalam reforma agraria.

### **Pemberdayaan Ekonomi sebagai Instrumen Transformasi Kapasitas UKM**

Pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (*community empowerment*) menjadi salah satu kerangka utama dalam menjelaskan bagaimana penataan akses reforma agraria



mampu meningkatkan produktivitas UKM. Teori ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama dalam penataan akses meliputi akses terhadap permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan pelatihan dan pendampingan usaha. Namun demikian, hasil analisis SWOT pada Tabel 2 menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan signifikan pada aspek manajerial, pemasaran, dan literasi usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan kapasitas aktual pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

Selain itu, data akses permodalan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pembiayaan bagi UMKM relatif tersedia dalam jumlah yang besar, namun belum diikuti dengan peningkatan produktivitas usaha secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa permodalan bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan usaha, melainkan harus diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sistem pendampingan usaha.

Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi harus dipahami sebagai proses yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup aspek peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta akses terhadap peluang ekonomi. Program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta penguatan jaringan pemasaran menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing UKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mikoa et al. (2022) dan Nento & Shamin (2025) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan usaha masyarakat.

### **Pendekatan Berbasis Lokal sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah**

Dalam perspektif *local economic development*, pembangunan ekonomi daerah harus didasarkan pada potensi dan karakteristik lokal yang dimiliki oleh suatu wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan akses reforma agraria akan lebih efektif apabila dirancang secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayah.

Di Kabupaten Kebumen, struktur industri UKM yang didominasi oleh sektor makanan dan minuman serta industri rumah tangga (Tabel 3) menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal memiliki basis yang kuat pada sektor-sektor berbasis sumber daya lokal. Hal ini memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan sektor unggulan tersebut.

Selain itu, hasil analisis SWOT pada Tabel 2 menunjukkan adanya peluang besar pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif yang dapat dikembangkan secara terintegrasi. Pendekatan berbasis lokal tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat yang merasa bahwa kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal cenderung lebih aktif dalam mendukung implementasi program.

Dengan demikian, pendekatan berbasis lokal menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa kebijakan penataan akses reforma agraria mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas UKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian Naufal et al. (2024) dan Saragih et al. (2024) yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berbasis wilayah mampu meningkatkan daya saing lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



### **Harmonisasi Regulasi dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan**

Aspek regulasi merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penataan akses reforma agraria. Dalam perspektif teori kebijakan publik, konsistensi dan harmonisasi regulasi menjadi prasyarat utama dalam menciptakan kepastian hukum serta efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi pertanahan masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan reforma agraria. Tumpang tindih kebijakan serta kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan terhambatnya implementasi program di lapangan. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program reforma agraria.

Lebih lanjut, ketidaksesuaian regulasi juga berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Proses harmonisasi ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan implementatif. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Putra et al. (2025) serta Sari & Suhadi (2024) yang menekankan pentingnya reformasi regulasi dalam mendukung keberhasilan kebijakan reforma agraria.

### **Inovasi dan Digitalisasi sebagai Katalisator Peningkatan Produktivitas**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang strategis dalam meningkatkan efektivitas penataan akses reforma agraria serta produktivitas UKM. Dalam perspektif *innovation theory*, teknologi berperan sebagai katalisator yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta daya saing usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) dan pemasaran digital memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan lahan serta memperluas akses pasar bagi pelaku UKM. Namun demikian, tingkat adopsi teknologi masih relatif rendah, terutama di kalangan pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital.

Kondisi ini juga tercermin dalam hasil analisis SWOT pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa kelemahan utama UKM terletak pada aspek pemasaran dan manajemen usaha. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan daya saing UKM di era ekonomi digital.

Intervensi kebijakan yang mendorong digitalisasi, seperti pelatihan pemasaran digital, pengembangan platform e-commerce, serta penyediaan infrastruktur teknologi, menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri & Amrullah (2024) serta Lubis et al. (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar secara signifikan.

### **Sintesis Strategis dan Implikasi Kebijakan**

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan akses reforma agraria memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas UKM. Integrasi antara aspek aset, akses, kelembagaan, pemberdayaan, regulasi, dan inovasi menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Sinkronisasi antara hasil sintesis literatur dan kondisi empiris Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam mengintegrasikan berbagai komponen tersebut secara holistik. Dalam hal ini, penguatan



kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, penataan akses reforma agraria tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap redistribusi aset, tetapi sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan yang adaptif, berbasis lokal, dan didukung oleh tata kelola yang kuat akan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas UKM dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

## **KESIMPULAN**

Penataan akses reforma agraria terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Hasil *Systematic Literature Review* (SLR) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh redistribusi aset, tetapi sangat bergantung pada efektivitas *access reform* yang mencakup akses permodalan, peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, serta perluasan jaringan pemasaran. Integrasi antara *asset reform* dan *access reform* menjadi prasyarat utama dalam mendorong transformasi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola (*governance*) dan sinergi kelembagaan. Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi krusial dalam mengoordinasikan berbagai aktor yang terlibat. Kelemahan koordinasi, disharmonisasi regulasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan terbukti menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor institusional.

Konteks Kabupaten Kebumen memperlihatkan bahwa pendekatan kebijakan berbasis lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas UKM. Karakteristik wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian dan usaha skala kecil menuntut adanya strategi penataan akses yang kontekstual dan adaptif. Pemanfaatan potensi lokal, seperti pengembangan industri rumah tangga dan UMKM berbasis sumber daya alam, terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya integrasi program lintas sektor masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Sintesis keseluruhan menunjukkan bahwa penataan akses reforma agraria berpotensi menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendorong peningkatan produktivitas UKM di Kabupaten Kebumen. Optimalisasi kebijakan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis kebutuhan lokal, sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, R., & Warman, K. (2025). Penataan Aset dan Penataan Akses Dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat. *UNES Law Review*, 8(2), 525-536. <https://doi.org/10.31933/vsewbm55>
- Amrullah, M. N. K., & Wening, N. (2026). A Systematic Literature Review of Land Bank Management Strategies, Agrarian Reform, and Land Governance (2020–2025).



- Marcapada: *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 5(2), 140–162. <https://doi.org/10.31292/mj.v5i2.187>
- Amrullah, M. N. K., Widodo, W., & Sapardiyono, S. (2025). The Dynamics of Access Reform Arrangement in Salted Egg Entrepreneurship in Tegal City. *International Journal of Economic Integration and Regional Competitiveness*, 2(6), 5-15. <https://doi.org/10.61796/ijeirc.v2i6.350>
- Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas. *Tunas Agraria*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131>
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 758–775. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>
- Junarto, R. (2022). Agrarian reform: the reflection on the performance of the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta. *Inovasi*, 19(2), 133-145. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Prosedur kerja program penataan akses reforma agraria*. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Lubis, M. A., Abdilla, M. F., & Berutu, S. S. (2024). Reformasi Agraria dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia pada Era Orde Lama dan Orde Baru. *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah*, 14(2), 47–52. <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.125>
- Mikoa, J., Rambe, R., & Mardiani, L. (2022). Efektivitas pemberdayaan UMKM dalam kemajuan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat desa. *ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 4(2), 99-106. <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/AL-QASD/article/view/482>
- Mutiara, T., & Safitri, R. M. (2025). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pesisir Pantai untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal Masyarakat di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 19(2), 213-233. <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v19i2.15011>
- Nadila, N., Ghofur, R. A., & Fasa, M. I. (2025). Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 9(1), 389-407. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2417>
- Naufal, Y. A., dkk. (2024). Pengaruh reforma agraria terhadap pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry*, 2(1), 184–190.
- Nento, H. P., & Shamin, N. (2025). Model pemberdayaan ekonomi masyarakat desa torosiaje pada kegiatan penataan akses reforma agraria. *Awara: Jurnal Pengabdian Masyarakat (AJPM)*, 2(2), 59-70. <https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/AJPM/article/view/397>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2022). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Revista panamericana de salud publica*, 46, e112. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003583>
- Putra, I. G., Azzahra, M., Prakoso, B., & Efendi, A. (2025). Disharmonisasi Aturan Hukum Bank Tanah Dan Reforma Agraria. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 129-



142. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.11988>
- Putri, N. I., & Amrullah, M. N. K. (2024). Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Dusun Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Lahan. *Widya Bhumi*, 4(1), 85–100. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.93>
- Rahmadani, S., & Saraan, M. I. K. (2022). Dinamika Perkembangan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 15–22. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.9769>
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access reform dalam program reforma agraria: studi kasus desa tahunan kecamatan tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 381-390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25067/22319>
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan akses modal sebagai strategi access reform dari tanah pelepasan kawasan hutan di kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>
- Salfutra, R. D., Kusuma, W., & Situmorang, A. A. C. (2025). Reforma agraria: Antara konsep, realita, dan problematika. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 8(1). <https://doi.org/10.35141/jy63n247>
- Saragih, F. Y., Chayati, S. N., & Wahyuni, W. (2024). Implementation of Access Arrangements for Agrarian Reform: A Case Study in the Kampung Tua of Tanjung Riau, Batam City. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(1), 92–109. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i1.776>
- Sari, A. O. V. P., & Suhadi. (2024). Reformasi regulasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1). <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.48691>
- Simamora, Y. P. (2025). Implikasi Keberadaan Reforma Agraria dalam Menekan Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1153>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sopyan, A. A. P., & Sidipurwanti, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>
- Sopyan, A. A. P., Pujiriyani, D. W., & Christine, R. V. (2024). The Relevance of Agrarian Reform to the Sustainable Development Goals: Analysis of Community Land Empowerment for Food Sufficiency and Gender Equality through the Fishbone Diagram Method. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(2), 181–198. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i2.813>
- Sopyan, A. A. P., dkk. (2024). Analisis Kebijakan Penataan Akses Reforma Agraria dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 85–104. <https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i3.1404>